

Wawancara dengan K.H. Kholil Bisri

Sabilillah dan Sabililmustadz'afin



Bagaimana gambaran kongkrit negara *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*?

Seperti yang kita lihat pada institusi -yang kemudian disebut negara- yang dipraktekkan oleh *kanjeng* Nabi, terdapat beberapa hal; pertama, semua yang dilakukan bermuatan *akhlaqul karimah*. Kedua, pendistribusian wewenang dilakukan secara adil. Ketiga, penempatan orang yang benar pada fungsi yang benar pula, artinya yang ditunjuk menduduki suatu posisi harus berkualitas. Keempat, adanya

kesetiaan seluruh perangkat negara kepada komitmen dasar.

Komitmen dasar tersebut ada dua; pertama adalah *sabilillah* dan kedua *sabilil mustadz'afin*. Hal ini dilakukan juga oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Konsep Nabi tentang pengelolaan negara seperti saya sebut tadi, dilakukan dengan tepat oleh 'Umar Bin 'Abdul 'Aziz. Sama-sama raja *daulah* 'Umayyah, yang dilakukan oleh beliau menjadi sangat lain. Meskipun beliau seorang raja, tapi beliau mengembangkan demokrasi, hingga singgasananya terbuat dari kulit kambing dan bertempat di masjid, bukan di istana.

Selain ciri di atas, apa lagi yang bisa dikenali dari konsep negara tersebut?

Selain itu, harus ada faktor lain yang dilakukan oleh pemimpin yaitu menjunjung tinggi rasa keadilan. Adil pada diri sendiri dan adil pada orang lain. Adil pada porsi garapan, adil terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Hal ini dilakukan oleh sahabat 'Umar sedemikian rupa sampai sahabat 'Umar sendiri tidak sadar bahwa *likulli dlilii ni'matin mabsud* (setiap yang memiliki nikmat mengundang iri, red.) itu ada. Hal ini berakibat terbunuhnya sahabat 'Umar. Dibunuhnya 'Umar bukan karena ketiadaan kontribusi yang adil kue pembangunan oleh 'Umar. Hal ini memang karena adanya faktor *basud*.

Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat seperti 'Utsman, 'Ali, Mu'awiyah, Yazid, dan Abdul Malik bin Marwan?

Pemimpin-pemimpin pada saat itu, terbentuk, terkondisi untuk tidak bisa memenuhi semua. Hal ini disebabkan terjadinya *yad-huluna fi dinillahi afwaja* (islamisasi besar-besaran, red.). Seperti kita lihat dalam sejarah, setelah Abu Bakar mengemban misi Rasulullah, beliau mengutus Usamah bin Zaid, yang kemudian pada zaman Umar bisa menaklukkan Konstantinopel. Sehingga wilayah Islam menjadi luas dan besar sementara sumber daya manusianya belum memadai sehingga pilihannya adalah *awla faawla, aqdam tsumma aqdam* (prioritas pada hal terpenting, red.).

Pada zaman mereka, seluruh perhatian terkonsentrasi pada usaha-usaha konsolidasi. Apalagi ketika berbagai konflik mulai muncul. Misalnya, pada zaman sahabat 'Utsman boleh disangka ada kecenderungan nepotisme, itu karena beliau melihat pengalaman pada masa Abu Bakar maupun 'Umar bahwa ternyata orang yang bukan saudara tidak dapat dipercaya. Bahkan 'Umar dibunuh oleh orang dekatnya. Sehingga 'Utsman mengambil sikap untuk mengambil saudara-saudara dekatnya untuk membantunya memerintah. Dan dia tahu bahwa di sekelilingnya terdapat kelompok-kelompok oposan seperti Khawarij yang akhirnya membunuh beliau. Pada awalnya kelompok Khawarij ini hanya mengancam kepada 'Utsman agar mau melepaskan jabatan. 'Utsman menolak dengan dasar bahwa ia pernah *didawuhi* (dibilangi, red.) *kanjeng* Nabi; "kalau kelak engkau memakai baju jangan kau lepas baju itu kecuali dipaksa".

Pada masa 'Ali, keadaan semakin keruh, sehingga pusat perhatian 'Ali adalah menjaga keutuhan umat. Dari usaha menghadapi istri Nabi A'isyah, hingga menghadapi perang Siffin yang akhirnya sahabat 'Ali kalah dalam diplomasi oleh Mu'awiyah. Mu'awiyah tahu persis bahwa kalau

pemerintahannya dijadikan demokratis seperti para khalifah terdahulu, bakal merusak kekuasaannya. Karena bagi dia, untuk menerapkan pemerintahan demokratis, diperlukan kekuasaan mutlak. Maka akhirnya beliau mengubah kekhalifahan menjadi kerajaan, daulah 'Umawiyah.

Dalam upaya demokratisasi yang dilakukan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, apakah ada upaya-upaya pembentukan institusi?

Pada saat itu tidak ada. Tidak dibentuk institusi, misalnya organisasi-organisasi independen, atau lainnya. Tetapi beliau tahu persis siapa yang menjadi tokoh di masyarakat. Tokoh-tokoh itu dilibatkan semuanya dalam mengambil keputusan negara. Jadi, dasar pemerintahan yang diambil oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz adalah *akhlaqul karimah* seperti yang digariskan oleh Nabi sehingga dicatat oleh sejarah bahwa beliau berhasil dalam menjalankan pemerintahan dan mengembangkan demokrasi. Pada zaman beliau, ilmu pengetahuan menjadi maju dan berkembang. Setelah munculnya ulama dominasi negara menjadi sangat berkurang, dan kemudian yang menjadi dominan adalah para ulamanya. Seperti Hasan Basri, Abu Tsaur, Abu Hasan Al-Baqillani, dan juga ada kelompok lain yang kemudian menjadi Mu'tazilah.

Jadi sejarah Islam zaman itu tidak berarah dan berpusat pada daulahnya, tapi pada pemikiran. Sebenarnya, Islam secara *dauly* (negara), yakni pengelolaan pemerintahan sebagaimana yang dilakukan Nabi, hanya ada beberapa saja seperti pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Harun Al-Rasyid, Al-Mahdi, dan Mu'tashim Billah. Selebihnya boleh dikatakan sekuler. Apa lagi pada zaman Usmaniyah dan zaman Abdurrahman Addahil di Andalusia. Abdurrahman, lebih pada kemakmuran, pada *sabilil mustad'afin* saja tanpa menyertakan *sabilillah*. Padahal antara jihad *fi sabilillah* dan jihad *fi sabilil mustad'afin* harus seimbang sebagaimana yang dilakukan oleh *kanjeng* Nabi. Sebenarnya, gambaran negara Islam belum

pernah ada. Dahulu ada *daulah* khulafaurrasyidin, *daulah* 'Umawiyah, *daulah* 'Abasyiah, *daulah* 'Utsmaniyah, tapi tidak ada *daulah* Islamiyah.

Maka menurut al-Qur'an pengelolaan politik harus mempertimbangkan *fi sabilillah* dan *fi sabilil mustadl'afin*. Kalau kita kaitkan dengan ayat *atibi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil armi minkum*, kata *amru* di situ mencakup *amrullah wa amrul mustadl'afin*. Jadi ketaatan kepada pemimpin yang diharuskan oleh Islam adalah ketaatan kepada pemimpin yang memiliki komitmen kepada *amrullah dan amrumustadl'afin*. *Mustadl'afin* memperoleh penekanan karena lazimnya mereka yang mempunyai tuntutan, misalnya tercukupinya sandang pangan, kebebasan, kemerdekaan, perlindungan hak-hak asasi dan sebagainya.

Untuk mempraktekkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi dalam konteks negara modern seperti sekarang ini bagaimana menurut Anda?

Nabi memberi kebebasan kepada penyelenggara negara untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal, ketika beliau melaporkan kepada Nabi; "saya mengambil keputusan merujuk pada al-Qur'an, jika dalam al-Qur'an tidak ada saya merujuk pada Sunnah, kalau di dalam Sunnah tidak ada, saya merujuk pada *hujjah*". Artinya, dalam soal ini diperkenankan untuk ijtihad. Ijtihad di sini tentu saja sudah harus kontekstual dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini biasanya timbul kerancuan. Sebab, kepentingan, interest menjadi penyebab pertentangan dengan al-Qur'an dan pesan-pesan Nabi. Interest muncul karena orang cenderung melihat kepada masa yang sangat dekat. Padahal sebetulnya, yang harus diperhatikan adalah sekarang, nanti dan kelak.

Dari sekian model penyelenggaraan negara yang ada dalam sejarah Islam yang paling mungkin untuk digunakan sebagai wadah

untuk mencapai apa yang dikehandaki oleh Islam itu yang mana?

Hingga sekarang belum muncul, tapi yang *memper* (mirip) ada. Misalnya merujuk pada apa yang dilakukan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Beliau melibatkan semua unsur masyarakat dalam mengambil keputusan. Beliau sangat populis, sama dengan orang awam. Beliau berbincang-bincang di pasar, tidak elitis, tidak eksklusif. Beliau sederhana, hanya punya istri satu. Sebagaimana Nabi, ia juga mengatakan; "kalau kamu lapar saya juga lapar". Dia tidak meniru para pendahulunya yaitu 'Abdul Malik bin Marwan yang membuat aksessori istananya dari dinar. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dicintai oleh rakyatnya karena sifat kesederhanaan, keadilan, *friendship*-nya tinggi serta kearifannya. Kalau kita lihat sekarang, masih belum ada orang seperti beliau.

Uraian Anda tadi hanya menyentuh moral pribadi pemimpin. Kemudian, sistem yang bisa kita adopsi untuk mewujudkan bentuk negara *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang paling mungkin yang mana?

Wah ini yang repot.

Selama ini banyak orang berpendapat bahwa bentuk negara demokrasi jauh lebih mungkin untuk kita adopsi.

Boleh. Tapi demokrasi itu sendiri juga bukan tanpa cela, karena bertumpu pada kekuatan mayoritas. Dalam pengambilan keputusan, yang menang adalah yang kuat, yang banyak. Mau tidak mau timbul peluang yang kuat untuk menindas yang lemah. Untuk menghindari tirani mayoritas, Nabi pada suatu saat *didawuhi* (memperoleh wahyu, Red.); *wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta sadzdzan ghalidlalqalbi lansadzdzu minhaulika fa'fu'anhum wastaghfirlahum wasyawirhum fil amri*. Ada tiga faktor yang harus dilakukan *fa'fu'anhum*,



wastaghfir labum dan wasyawirbum fil amri. Fa'fu'anhum pengertiannya, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, kalau salah katakanlah salah dan harus mau menerima pendapat orang lain. *Wastaghfir labum*, maksudnya, kalau orang lain salah mintakan ampun kepada Allah. Kalau mengambil keputusan tidak boleh sendiri, ini *wasyawirbum fil amri*. Ketiga faktor ini tidak bisa dilakukan tanpa ada *layyin* -dari kata *lintalabum*- sifat terbuka, fleksibel, elastis, bisa menerima siapa saja, bekerjasama, bergaul kepada siapa saja. Dengan sifat *layyin* ini Nabi melakukan tiga faktor tadi. Meskipun Nabi itu ma'shum, tapi Nabi tidak merasa bahwa dirinya ma'shum. Ia tidak merasa tidak akan pernah salah. Jika ini bisa dilakukan oleh presiden, gubernur, bupati maka mereka tidak anti kritik, tidak anti dialog, dan *well come* terhadap pendapat orang lain apalagi minta disanjung, dikultuskan.

Lalu bentuk negara mana yang bisa diadopsi? Jika negara demokrasi, demokrasi dalam warna apa? Apakah kapitalistik, sosialistik, komunistik atau demokrasi Pancasila yang tidak jelas itu? Kita lalu

bertanya ulang apa memang demokrasi merupakan konsep yang paling dekat dengan Islam? Sebab mengenai partisipasi rakyat dalam Islam ada dua bentuk; *wasyawirbum fil amri*, dan *wa amrubum syura bainabum*. *Wa syawirbum fil amri* adalah bentuk pengambilan keputusan atas suatu masalah yang diajukan oleh pemerintah dan sedikit melibatkan partisipasi rakyat dan pemerintah lebih dominan. Sedangkan *wa amrubum syura bainabum* merupakan pengambilan keputusan atas sebuah masalah yang diajukan oleh rakyat melalui musyawarah yang murni dilakukan oleh rakyat. Ini kerakyatan, kedaulatan adalah ditangan rakyat, sehingga keputusan atas suatu persoalan datang dari rakyat itu sendiri. Dua-duanya ada dalam Islam.

Mungkin tidak dilakukan penggabungan kedua-duanya?

Kalau kita menggabungkan antara *wasyawirbum fil amri* dengan *syura bainabum*, harus ada mekanisme yang jelas. Pesan Nabi adalah *yassiruu wala tu'assiru*, *basyiruu wala tunaffiru*, *dabbiruu wala tuthawwiru*. Artinya, penguasa jangan membuat susah rakyat, jangan mengintimidasi mereka, dan jangan hanya selalu menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Jika ini tidak dipenuhi maka prinsip demokrasi yakni musyawarah yang meliputi dua bentuk tadi menjadi kacau. Dan demokrasi yang intinya musyawarah yang islami ini tidak terwujud. Dan prinsip demokrasi menurut Islam adalah musyawarah.

Bisakah ini dikembangkan sehingga benar-benar bisa dipraktekkan?

Sebetulnya tinggal mewujudkan mekanismenya saja. Bagaimana seorang kepala negara diangkat oleh rakyat, sehingga dalam mengambil keputusan melibatkan rakyat dan harus dalam prinsip kesetaraan. Yang terjadi di berbagai pemerintahan otoriter rakyat tidak diajak untuk bermusyawarah.

Termasuk Pak Harto itu tidak pernah mengajak orang lain untuk bermusyawarah, hingga Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh bermusyawarah. Konsep *wasyawirhum fil amri* gambarannya begini; seorang presiden mengajukan rancangan undang-undang misalnya, ia harus hadir dan mempertahankan rancangannya itu di depan parlemen. Jika ada kesalahan, harus boleh dikoreksi, jika kurang boleh dilengkapi dan jika harus ditolak boleh ditolak. Untuk melaksanakan konsep ini saja sulit, apalagi melaksanakan *waamrubum syura bainahum* yang merupakan konsep musyawarah murni oleh rakyat. Karena, penguasa jika terlalu lama berkuasa akan menjadi tiran. Tantangannya sekarang, bagaimana agar seorang pemimpin negara mau, bersedia untuk bermusyawarah dengan rakyat, jalan pikirannya sejalan dengan *sabilillah* dan *sabilil mustadz'afin*. Sebagaimana kata Nabi, jika kita tidak menyukai seorang penguasa, maka jangan ditentang secara terang-terangan, bawa dia ke tempat sepi dan utarakan apa yang kita inginkan.

Di sisi lain, kita semestinya membentuk mekanisme sistemik agar terdapat kekuatan-kekuatan pada rakyat atau *people power* sehingga mereka bisa memunculkan, mendefinisikan kepentingan mereka, dan diputuskan secara bersama-sama oleh mereka sendiri. Kemudian bagaimana membuat masyarakat itu menjadi kuat sehingga mereka mampu diajak untuk musyawarah serta mampu melakukannya di kalangan mereka sendiri. Bagaimana teknik operasional penggabungan tersebut? Untuk itu pemerintah dan rakyat harus duduk bersama-sama untuk membicarakan konsep secara bersama.

Azas keterlibatan dan pendistribusian yang adil sebagaimana pengalaman yang saat ini kita alami, tidak terjadi. Menurut Anda?

Memang *nggak* pernah ada. Undang-Undang Dasar memang tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Namun itu diingkari *kek*. Kalau ada pengakuan rahmat Allah, semestinya negara ini harus lebih senang untuk mencukupi diri sendiri dengan segala yang dia miliki. Itu yang pertama. Sejak awal Orde Baru, strategi pembangunan negara ini bertumpu pada utang. Jadi hasil pembangunan yang sekarang adalah hasil *ngutang*. Yang kedua, jika pengakuan itu ada, aset bangsa ini tidak akan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Rahmat Allah ini harus dirasakan bersama.

Di sini diperlukan komitmen moral yang kuat. Nabi mengatakan bahwa *innama buitstu liutammima makarimat ahlaq*, jadi semua apa yang dilakukan baik itu keputusan, pelaksanaan, konsep hingga perencanaan harus berdasarkan moral. Dalam menjaga moral, Al-Quran, Sunnah dan ijtihad yang benar kemudian menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, keterlibatan orang-orang yang memahami pesan-pesan langit dan memiliki komitmen kepada kepentingan *mustadz'afin* sekaligus kepentingan *aghniya'* harus tidak marjinal lagi. Peran ini pernah dilakukan oleh NU pada zaman konstituante dulu. Dulu anggota konstituante dari NU semuanya para kiai.

Pada era Orde Baru terdapat strategi korporatisme negara, termasuk terhadap para ulama. Sehingga muncul ulama-ulama tertentu yang mau digunakan oleh rezim sebagai alat untuk justifikasi berbagai tindakan amoral penguasa. Sebuah kemunduran tentu. Bagaimana ini?

Ya, tidak otentik. Jadi legitimasi yang diberikan oleh MUI atau KWI dan lain-lain, menjadi tidak otentik, palsu. Sebab justifikasi mereka itu berangkat dari keinginan untuk selamat saja. Ada yang ingin selamat dalam artian ingin terpenuhi interestnya, ada yang karena memang dipaksa. Kelompok yang kedua ini, mereka itu hanya memberikan amar makruf saja, tidak berani menahi munkari.

Sistem politik masa mendatang yang betul-betul berpijak kepada asas *wasyawirhum fil amri dan waamruhum syura bainahum* harus seperti apa?

Pokoknya jangan Machiavelislah. Sistem politik yang Islami harus *istishlah*, terus-menerus mengadakan perbaikan untuk mendorong masyarakat mendapatkan kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat. Jika wadahnya adalah yang sudah ada ini, maka eksekutif harus kuat, legislatif mesti kuat dan yudikatif yang kuat pula. Sehingga, eksekutif benar-benar mencerminkan perilaku aparat negara yang mengabdikan pada bangsa, legislatif betul-betul cerminan dari kemauan rakyat, yudikatif juga betul-betul cerminan penjaga aturan main dan betul-betul menegakkan keadilan. Kesemuanya ini harus menjunjung tinggi amanah. Nah amanah ini adalah *sabilillah* dan *sabilil mustadl'afin*. Untuk memenuhi amanah ini harus memiliki moral yang baik. Tapi yang terjadi sekarang, yang kuat adalah eksekutifnya saja. Maka untuk memperkuat legislatif dan yudikatif para pemegang kekuasaan dan para wakil rakyat harus benar-benar representasi rakyat, dan memang ahlinya.

Dalam upaya memperkuat legislatif, peranan sistem kepartaian, bagaimana pemilu dilaksanakan, bagaimana rekrutmen anggota perlemen dan sebagainya adalah hal penting.

Undang-Undang yang menyangkut itu semua harus diubah. Orang yang menyusun Undang-Undang baru harus melihat rakyat dan melihat keadaan yang sebenarnya dan tidak melihat kepentingannya sendiri. Boleh melihat dirinya, tapi yang dilihat adalah nuraninya. Penguatan legislatif tidak terjadi kalau Undang-Undangnya tidak diganti dengan UU politik yang mencerminkan keadilan, dan sarat muatan moral. Meskipun cita-cita kita menginginkan legislatif dan yudikatif yang kuat, tapi kalau masih mendewakan lembaga legislatif

yang ada ini, tak mungkin terjadi.

Saya sangat setuju jika semuanya dilibatkan dalam membuat UU Politik. NU diundang. Muhammadiyah diundang dan LSM juga diundang untuk membahas RUU politik. Namun yang perlu diperhatikan adalah agar ormas dan LSM memilih utusan-utusan yang menguasai konsep politik bukan orang yang kredibilitasnya diragukan.

Sekarang orang banyak bicara tentang KKN, meskipun sebenarnya memaknai reformasi hanya sebagai upaya memberantas KKN adalah distorsi reformasi itu sendiri. Namun yang jelas, fenomena ini tentu ada kaitannya dengan bagaiman fungsi dari lembaga yudikatif. Bagaimana menurut Anda?

KKN itu akibat dari tidak adanya kontrol. Karena tidak adanya perimbangan lembaga trias politika itu. Eksekutif sangat kuat bahkan anak pejabat bisa memaksa para hakim. Sebab lain, menurut saya adalah lemahnya moral atau *akhlaqul karimah*. KKN itu adalah akibat saja. Orang berbuat korupsi karena pertama, ada kesempatan, bahkan *diwarabi*, tidak ada kontrol karena yang mengontrol tidak berani, takut dipecat atau direcall, sedangkan masyarakat sendiri kadang-kadang membantu dengan jalan jika ada urusan mereka pakai amplop untuk mempermudah urusan, dan yang kedua tentu krisis moral. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Keberanian melakukan perubahan harus terus dipupuk. Jangan justru *diweden-wedeni* (ditakut-takuti) dengan intimidasi atau pemecatan.

Sejauh mana usaha-usaha yang telah kita lakukan melalui gerakan anti KKN ini bisa memperoleh hasil?

Perkiraan saya 25% berhasil. Kalau total, sulit. Bila KKN itu diibaratkan suatu penyakit, ia sudah berurat berakar pada badan. Maka harus dicabut sampai akar-akarnya. Bersamaan dengan itu kita harus membuat lembaga kontrol yang kuat. ❖❖